



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 23 Januari 2023

Halaman: 2

TERAS

Kemiskinan Ekstrem

KEMISKINAN ekstrem atau kemiskinan absolut, adalah sejenis kemiskinan didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai "suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Kemiskinan ekstrem tidak hanya bergantung pada pendapatan, tetapi ketersediaan jasa juga.

Di DIY, ternyata, masih ada daerah yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Seperti di Kabupaten Gunungkidul, ada tujuh Kapanewon.

Terkait hal tersebut pemkab mulai fokus mengurangi kemiskinan ekstrim tersebut dengan berbagai skema dan program. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gunungkidul, Giyanto, menyebut tujuh Kapanewon dalam kategori kemiskinan ekstrim tersebut Gedangsari, Playen, Nglipar, Ponjong, Tepus, Saptosari, dan Karangmojo. Upaya mengurangi kemiskinan ekstrem pin kini terus dilakukan berkelanjutan.

Secara Keseluruhan, presentase penduduk miskin di Gunungkidul, tahun 2022 lalu tercatat sebesar 15,89 persen atau mengalami penurunan dibanding tahun 2021 yang mencapai sebesar 17,69 persen. Untuk mengurangi kemiskinan saat ini pemkab fokus melalui penganan program-program dalam pokok-pokok pikiran (pokir) pemerintah kabupaten yang kini diarahkan program penanganan ke tujuh Kapanewon. Adapun program pemberdayaan berupa beras dari pokir meliputi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dan Usaha Ekonomi Produktif Keluarga Miskin (USEPKM). Tahun ini menyalurkan bantuan KUBE Fakir Miskin sebanyak 218 dan USEPKM sebanyak 109 bantuan.

Untuk KUBE Fakir Miskin setiap kelompok mendapat Rp. 20 juta, sedangkan USEPKM setiap kelompok dapat Rp. 10 juta. Namun demikian, upaya tersebut baru akan dapat dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Pada tahun ini bantuan yang turun masih menyebar dan belum fokus di tujuh Kapanewon kategori kemiskinan ekstrem.

Selain itu, dalam upaya mengurangi angka kemiskinan pihaknya mendorong agar Pemerintah Kalurahan melaksanakan musyawarah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat Kalurahan yang bertujuan untuk validasi dan mengusulkan kembali nama-nama warga yang sangat membutuhkan bantuan. Bagi warga yang belum masuk data dan layak mendapatkan bantuan maka bisa dimasukkan, tetapi bagi yang sudah masuk data dan diteliti sudah tidak layak tidak mendapat bantuan.

Semoga dengan gerakannya yang dilakukan pemerintah maupun pihak mana pun yang tersentuh, kemiskinan ekstrem yang masih terdapat di sekitar kita bisa segera terhapuskan. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005